

**KAJIAN KARAKTERISTIK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM  
BERAKTIVITAS DAN MEMILIH LOKASI BERDAGANG DI  
KAWASAN PERKANTORAN KOTA SEMARANG  
(Wilayah Studi : Jalan Pahlawan-Kusumawardhani-Menteri Soepeno)**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:

**POPY ROSITA  
L2D 002 430**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

## ABSTRAK

Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal, mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor informal demi kelangsungan hidupnya, salah satunya dengan berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut McGee dan Yeung (1977:25), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000: 28), PKL banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional kota, termasuk kawasan perkantoran. Demikian juga dengan kawasan perkantoran di Kota Semarang, seperti Kawasan Perkantoran Jalan Pahlawan yang mempunyai daya tarik besar sehingga perkembangan PKL di kawasan perkantoran perkembangannya paling pesat dibandingkan kawasan perkantoran yang lain. Namun, karena selama ini perencanaan ruang kota hanya dibatasi pada ruang-ruang formal saja sedangkan ruang untuk kegiatan informal tidak direncanakan, maka PKL menggunakan ruang publik yang ada di sekitar kawasan perkantoran tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik oleh PKL tersebut seharusnya dapat ditertibkan, salah satunya adalah dengan tindakan relokasi. Dalam rangka untuk menentukan lokasi baru bagi PKL, maka perlu dilakukan pengidentifikasian mengenai karakteristik PKL dalam beraktivitas dan memilih lokasi berdagang dimana dikaitkan dengan kegiatan formal yang berlangsung di sekitarnya, sehingga akan ditemukan kriteria lokasi yang diminati oleh PKL untuk ditempati. Dengan demikian, diharapkan karakter lokasi baru tersebut cocok dengan karakteristik berlokasi, sehingga PKL tidak kembali lagi ke lokasi larangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukenali karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam beraktivitas dan memilih lokasi berdagang di kawasan perkantoran pemerintahan Kota Semarang. Sasaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan adalah dengan menemukenali karakteristik PKL dalam beraktivitas dan memilih lokasi berdasarkan kondisi eksisting, menemukenali karakteristik PKL dalam beraktivitas dan memilih lokasi berdasarkan persepsi pedagang, serta menemukenali persepsi konsumen terhadap keberadaan PKL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan merumuskan variabel berdasarkan teori. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis distribusi frekuensi, crosstab, dan deskriptif kuantitatif. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui survei lapangan maupun instansi.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dirumuskan karakteristik PKL dalam beraktivitas dan memilih lokasi berdagang di kawasan perkantoran ini dapat dibedakan menjadi makro dan mikro. Secara makro, dapat diketahui bahwa salah satu bentuk keterkaitan aktivitas PKL dengan kegiatan formal di sekitarnya yaitu dapat mendatangkan banyak konsumen pegawai kantor; PKL mempunyai karakteristik memilih lokasi berdagang yang lebih ramai dikunjungi konsumen khususnya pegawai kantor yaitu dengan memilih lokasi yang berada dekat dengan kawasan perkantoran bahkan berbatasan langsung dengan gedung perkantoran atau pintu keluar masuk kantor. PKL juga mempunyai karakteristik dengan mencari lokasi berdagang yang berbatasan langsung dengan jalan raya (Jalan Pahlawan). Karakteristik PKL dalam beraktivitas dapat dilihat dari jenis barang dagangan yang dijual, dimana sebagian besar PKL di kawasan perkantoran ini makanan siap saji/latengan (warteg, nasi padang, soto, dan sebagainya). PKL juga selalu mempunyai target konsumen pasti yang terlihat dari dominasi konsumen, dimana dominasi konsumen PKL di kawasan perkantoran ini adalah pegawai kantor. Dalam beraktivitas, PKL mempunyai sifat pelayanan usaha menetap, karena sudah mempunyai lokasi dan sarana dagang tetap. Karakteristik aktivitas PKL yang lain yaitu menggunakan prasarana berupa air bersih, listrik, sampah, dan saluran pembuangan karena sebagian besar PKL merupakan PKL makanan siap saji dengan sarana dagang kios.

Adapun karakteristik PKL dalam beraktivitas dan memilih lokasi berdagang di kawasan perkantoran pemerintahan secara mikro, dapat dilihat dari karakteristik PKL di masing-masing penggal jalan tempat tersebarnya lokasi PKL. Karakteristik PKL tersebut dapat ditinjau berdasarkan kestrategisan lokasinya, ruang kegiatan PKL yang tersedia, luasan sarana dagang, jenis barang dagangan, aglomerasi pedagang, dominasi/target konsumen, serta hari usaha pelayanan. Karakteristik PKL di setiap penggal jalan tersebut berbeda-beda karena selain mendapat pengaruh dari kegiatan perkantoran, beberapa penggal jalan juga mendapat pengaruh dari kegiatan formal lain, seperti pusat kota, Kampus UNDIP, dan kawasan permukiman, sehingga membentuk karakteristik PKL yang berbeda-beda pula.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dengan penduduk angkatan kerja. Seperti diketahui, bahwa lapangan pekerjaan di perkotaan sebagian besar bergerak di sektor formal, yaitu bidang non agraris yang biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan bekal pendidikan yang cukup tinggi. Sisi yang berlawanan, jumlah penduduk angkatan kerja di Indonesia sebagian besar tidak mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan yang cukup tinggi sehingga mereka tidak dapat memenuhi kriteria-kriteria pekerjaan yang tersedia. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan. Sebagai manusia, mereka mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dengan keterbatasan kemampuan yang ada, mereka berusaha untuk tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut kemudian masuk ke dalam sektor informal yang menurut banyak ahli sebenarnya menguasai sebagian besar angkatan kerja di kota-kota. Menurut Badan Penanaman Modal Asing, sekitar 70% modal domestik dan 71 modal asing diinvestasikan di kota-kota besar di Indonesia, namun tragisnya industri dan pabrik-pabrik sektor modern yang diharapkan bersifat padat karya dan menyerap tenaga kerja tersebut faktanya bersifat padat modal dan menggunakan teknologi tinggi yang hanya menyerap 10%-16% angkatan kerja terdidik saja (Herlianto, 1997:61).

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, ketrampilan kurang dan umumnya para pendatang. Pengertian tersebut sebagai gambaran tentang sektor informal. Hal ini tergantung dari sudut pandang operasional maupun penelitian (Manning-Tadjuddin, 1996:90-91).

Adanya sektor informal dan formal di perkotaan menyebabkan munculnya kondisi dualistik pada kota-kota di Indonesia oleh karena adanya perbedaan aspek-aspek kehidupan kota. Dualistik merupakan kondisi dimana terjadi pertemuan antara dua kondisi atau sifat yang berbeda (Widjajanti, 2000:1). Pada aspek fisik kota, dualistik tersebut terjadi pada pembauran pola dan struktur rancang kota, seperti yang ditegaskan Sujarto dalam Widjajanti (2000:2), karakter dualistik tercermin dalam pola dan struktur kota-kota di Indonesia. Perkembangan kondisi dualistik harus diimbangi dengan kebijakan yang mengatur dan mengendalikan perkembangan tersebut, sehingga diharapkan nantinya tidak terjadi penurunan estetika kota.

Selama ini, perencanaan ruang kota hanya dibatasi pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang formal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (*activity support*). Menurut McGee dan Yeung (1977: 25), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Oleh karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi PKL, maka PKL menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal kota.

Tidak tertampungnya kegiatan PKL di ruang perkotaan, menyebabkan pola dan struktur kota moderen dan tradisional berbaur menjadi satu sehingga menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan moderen nan megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan cenderung kumuh. Tampilan fisik dualistik tersebut terjadi di seluruh ruang kota terutama di kawasan fungsional kota. Adapun yang dimaksud sebagai ruang fungsional kota adalah ruang perkotaan dengan fungsi khusus yang tercermin dari kegiatan utama yang berlangsung di kawasan tersebut, seperti kawasan pendidikan, perkantoran, kesehatan, perdagangan dan jasa, permukiman, maupun industri. Kehadiran ruang fungsional kota akan diikuti dengan kehadiran PKL dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap PKL mempunyai alasan yang berbeda dalam menentukan lokasi maupun jenis aktivitasnya. Karakteristik PKL yang berada di kawasan perkantoran berbeda dengan karakteristik PKL yang berada di kawasan permukiman. Hal ini dapat dilihat berdasarkan karakteristik aktivitasnya yang meliputi jenis dagangan, bentuk fisik sarana dagang, waktu berdagang, sifat pelayanan, golongan pengguna jasa, dan lain sebagainya. Selain itu, perbedaan karakteristik PKL dikaitkan juga dengan kegiatan utama yang berlangsung di kawasan fungsional kota tersebut.

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal (Usman, 2006:50), sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Permasalahan eksternal yang terjadi di tempat-tempat lain berkaitan dengan penataan PKL adalah kembalinya PKL yang sudah direlokasi ke tempat semula yang ditertibkan. PKL yang mendatangi kembali lokasi yang sudah ditertibkan tersebut terdiri dari PKL lama yang dulu ditertibkan dan PKL baru yang memilih lokasi tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tersebut mempunyai daya tarik dan potensi yang besar untuk ditempati oleh PKL. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan tindakan relokasi dengan mengadopsi karakteristik PKL masing-masing dalam menentukan lokasi baru bagi PKL. Diketuainya karakteristik aktivitas PKL, maka akan dijadikan dasar dalam mengidentifikasi karakteristik PKL dalam memilih lokasi berdagangnya dikaitkan dengan kegiatan utama yang berlangsung di lokasi PKL tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Waworoentoe (Widjajanti, 2000: 28), PKL biasanya akan tumbuh dan berkembang pesat pada ruang-ruang fungsional kota, salah satunya kawasan perkantoran.

Seperti di kota-kota besar lainnya, Kota Semarang juga mengalami masalah perkotaan yang tidak bisa menghindari kehadiran sektor informal, terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL juga hadir di kawasan perkantoran Kota Semarang. Sesuai dengan yang dituangkan dalam RDTRK BWK I dan BWK III Tahun 2000-2010, direncanakan sistem pusat pelayanan di Kota Semarang. Pusat pelayanan mempunyai pengertian fasilitas/konsentrasi dari beberapa fasilitas dengan jenis yang sama. Fasilitas pelayanan meliputi fasilitas komersial dan fasilitas pelayanan sosial (RDTRK BWK I, 2000:II-4). Dalam RDTRK BWK I, telah ditentukan fungsi perkantoran pemerintahan skala pelayanan kota terletak di sepanjang Jalan Pemuda dan Jalan Kimangunsarkoro, sedangkan skala pelayanan regional di sepanjang Jalan Pahlawan. Selain itu, sesuai yang dituangkan dalam RDTRK BWK III kawasan perkantoran juga dilokasikan di sepanjang Jalan Madukoro.

Kawasan perkantoran di Jalan Pahlawan yang merupakan fungsi perkantoran skala regional mempengaruhi perkembangan aktivitas di sekitarnya salah satunya ialah berkembangnya kegiatan informal PKL yang tersebar di penggal Jalan Kusumawardhani, Jalan Menteri Soepeno, dan Jalan Gergaji Pelem Raya. Kawasan Perkantoran Madukoro yang terletak di Kecamatan Semarang Utara mempunyai skala pelayanan kota, namun aktivitasnya tidak begitu mempengaruhi